

ABSTRAK

Kajian ini ingin melihat pengembangan kapasitas institusi puskesmas dalam rangka implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan diberlakukannya program JKN, maka tugas puskesmas sebagai garda depan dalam pelayanan kesehatan menjadi semakin berat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas institusi dari 3 aspek yaitu aspek institusi, manajemen, dan sumber daya.

Hasil kajian ini, secara umum masih terdapat kendala yang dihadapi oleh puskesmas dalam rangka pelaksanaan program JKN dari faktor ; (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) struktur organisasi, (4) disposisi dan lingkungan. Sedangkan kebutuhan puskesmas dalam rangka pelaksanaan JKN adalah ; (1) penambahan SDM, (2) penambahan sarana dan prasarana, dan (3) pelatihan.

Pengembangan kapasitas dari aspek institusi adalah : (1) restrukturisasi organisasi Puskesmas telah dilakukan dalam rangka mendukung JKN, (2) sudah ada sinkronisasi dan koordinasi program antar kelembagaan, (3) telah tersedia SOP untuk mendukung progam JKN walau kadang masih berubah-ubah, (4) Banyak kendala terhadap integrasi skema dari program Jamkesmas dan Jamkesda ke JKN, (5) kemudahan prosedur klaim dalam program JKN dibandingkan Jamkesmas dan Jamkesda.

Pengembangan kapasitas dari aspek manajemen adalah : Prosedure administrasi dalam proses pendaftaran lebih sulit, jika dibandingkan dengan skema dan mekanisme administrasi pada Jamkesda, (2) Ada kerumitan dan kekompleksitasan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran (Anggaran tidak membengkak, meskipun ada program JKN, Puskesmas tetap bisa memenuhi target, meskipun anggaran terbatas , karena terlambatnya pembayaran kapitasi Jasa Layanan, namun segera bisa teratasi manakala dana tersebut telah turun), (3) Pengelolaan dan distribusi obat sudah baik dan mudah ; (4) Penyediaan sarana dan prasarana kurang bagus ; (5) penyediaan alat-alat Kesehatan kurang lengkap.

Pengembangan kapasitas dari aspek sumber daya manusia adalah : (1) Peran pimpinan dalam mendorong bawahan, (2) Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang dilayani belum ideal; (3)Ketersediaan tenaga dokter sudah mencukupi; (3)Jumlah tenaga perawat, bidan dan laboran sudah mencukupi ; (4) Kebutuhan Pelatihan bagi tenaga kesehatan ; (5) Tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pelatihan sendiri

Sedangkan saran yang bisa disajikan dalam kajian ini adalah meliputi 4 (empat) aspek yaitu (1) kebijakan dan sistem, (2) kapasitas manajemen, (3) kapasitas institusional, dan (4) sumber daya

Saran untuk kebijakan dan sistem adalah : (1) Memperjelas tujuan dan sasaran JKN sampai ke tingkat bawah (2) meninjau kembali persyaratan Pendaftaran per KK dan kepemilikan rekening (3) mengintegrasikan data penerima Jamkesda ke dalam data penerima BPJS), (5) memperbarui data tentang masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan Kartu Kepesertaan JKN, (6) mensosialisasikan program JKN secara lebih masif , (7) menyederhanakan proses aplikasi kepesertaan agar cakupannya lebih meluas, (8) memperbesar *bandwidth* layanan online BPJS lebih lancar.

Saran untuk kapasitas manajemen adalah : (1) memberikan pelatihan manajemen bagi Kepala Puskesmas yang merangkap jabatan fungsional (dokter) agar dapat menjalankan fungsinya sebagai manajer secara lebih efektif, (2) memberdayakan Sarjana/magister Kesehatan Masyarakat sebagai manajer / Puskesmas (3) tidak membebankan tugas sebagai dokter keluarga bagi Kepala Puskesmas.

Saran untuk kapasitas institusional adalah : (1) memberikan wewenang yang lebih besar bagi Puskesmas untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab, (2) menjalankan BLUD secara bertahap bagi Puskesmas-puskesmas yang telah siap.

Saran untuk sumber daya adalah : (1) memberikan pelatihan petugas puskesmas, (2) menambah staf pelayan kesehatan bidang tertentu, (3) memberikan pelatihan manajemen dan administrasi keuangan bagi pelaksananya karena pada umumnya jabatan tersebut dirangkap oleh tenaga medis.